

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membutuhkan bandara baru serta berukuran luas karena Bandara Adisutjipto kelebihan kapasitas. Proyek yang sudah direncanakan oleh pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Angkasa Pura I. PT Angkasa Pura I segera merealisasikan Yogyakarta International Airport (YIA) yang berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu bentuk upaya dari pihak pemerintah dalam peningkatan sarana transportasi udara yang berstandar Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu disebabkan Bandara Internasional Adi Sutjipto yang sudah begitu cukup lama dan dalam kondisi yang sangat kurang memadai untuk kapasitas bandara karena di wilayah yang sudah begitu padat dan berada di tengah-tengah kompleks TNI Angkatan Udara. Pembangunan YIA merupakan agenda untuk mewujudkan pembangunan bidang terintegrasi dengan berkonsentrasi di wilayah Pantai Selatan. Terdapat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Yogyakarta tujuan dari adanya pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan perluasan infrastruktur wilayah, dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan Keputusan menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 1164 Tahun 2013 tentang Penempatan Bandar Udara Kulon Progo

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Telah diubah menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 836 tahun 2014, dan juga diperkuat dengan keputusan Gubernur Nomor 68/KEP/2015 Tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kulon Progo dan sudah dimulai proses pembangunannya mulai tahun 2013. Pembangunan yang membutuhkan luas lahan sebesar 645.63 hektar yang meliputi beberapa desa terdampak, yakni Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Jangkar, Desa Glagah, Desa Palihan, dan Desa Temon yang terdiri Temon Wetan dan Temon Kulon (<http://jogjapro.go.id>). Bandara *Yogyakarta International Airport* termasuk dari proyek MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Bermula dari Lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta No.13 tahun 2012 dan Perda No. 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Setiap kebijakan sudah pasti akan menemui hambatan sama saja halnya yang dialami PT Angkasa Pura I.

Perpres No. 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, DIY. Perpres ini mengatur tentang penugasan beberapa pihak untuk mempercepat pembangunan bandara YIA, termasuk tujuan dan peruntukan pembangunan bandara. Berdasarkan Perpres ini tujuan dan peruntukan Bandara YIA adalah untuk meningkatkan konektivitas di wilayah selatan khususnya di DIY, sedangkan peruntukannya adalah sebagai bandara Domestik dan Internasional, yang didukung dengan sistem angkutan multimoda. Sehingga

pembangunanpun dipercepat oleh pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan PT Angkasa Pura I. Namun ketika bandara tersebut sudah mulai berdiri tentu saja hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi perekonomian masyarakat terdampak relokasi bandara.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo bersama PT Angkasa Pura I memberikan solusi berupa Pelatihan Pembedayaan Masyarakat yang nantinya akan diikuti oleh masyarakat terdampak. mengenai pelatihan tersebut telah tertuang pada Peraturan Dalam Negeri No 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Masyarakat, dimana Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Warga Masyarakat adalah kelompok sasaran program pelatihan masyarakat. Mendirikan UMKM merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi perekonomian masyarakat yang terdampak. Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk lokal melalui koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan memberikan perlindungan produk lokal tersebut sangat berkaitan dengan mendirikan UMKM bagi masyarakat yang terdampak pembangunan

bandara akibat pengusuran lahan. Solusi selanjutnya, dengan membuka Peluang Potensi Investasi yang sesuai dengan Pembangunan Yogyakarta International Airport di Kecamatan Temon berlandaskan pada Permenhub No. 56 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara, yang mengatur bidang-bidang usaha investasi (kegiatan perekonomian) di dalam kegiatan kebandaraan.

Dampak ekonomi merupakan bagaimana suatu kegiatan pembangunan dapat menimbulkan berbagai dampak dalam peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari suatu implementasi kebijakan pembangunan merupakan penilaian dari keberhasilan suatu kebijakan pembangunan di suatu daerah tersebut. Semakin kecil dampak negatif yang dihasilkan maka semakin terlihat bahwa kebijakan itu dapat dinilai efektif. Namun, jika dampak yang dihasilkan lebih banyak negatif maka seharusnya dampak tersebut dapat dikelola oleh pemerintahan melalui instansi-instansi terkait sesuai dengan wewenang tupoksi. Adapun dampak segi ekonomi yang dihasilkan akibat dari proses pembebasan lahan ini sebagian dari masyarakat yang memiliki lahan tepi jalan raya provinsi tentu mendapatkan banyak ganti rugi yang sangat tidak terduga namun, beberapa warga yang memiliki tanah yang letaknya jauh dari jalan raya maka ganti rugi yang didapatkan memang diatas rata-rata.

Seiring berjalannya waktu berdirinya Bandara *Yogyakarta International Airport* sangat berpotensi dan berdampak positif karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita Kabupaten Kulon Progo diantaranya

dari sektor pariwisata, sektor ekonomi (UMKM) dan penanaman modal terutama investasi dapat berkembang dengan pesat. Pada dasarnya, setiap program yang diimplementasikan oleh pemerintah bertujuan untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat terdampak adalah suatu program yang efektif. Indonesia merupakan negara agraris yang lahan serta hasil pertaniannya melimpah dan masyarakat masih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi konflik agraria di Indonesia menjadi sorotan utama terkait alih fungsi lahan pertanian. Dampak negatif adanya bandara dikarenakan timbulnya konflik yang terjadi proyek pembangunan *Yogyakarta International Airport* di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Samsul (2014) konflik merupakan situasi yang dimana tindakan dari suatu pihak yang berpotensi menghalangi, menghambat, dan mengganggu suatu kegiatan. Kulon Progo merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Pembangunan bandara yang berpusat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menemui kendala dari masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Salah satu sikap yang menunjukkan penolakan pembangunan *Yogyakarta International Airport* disebabkan bertani adalah profesi dan penghidupan utama bagi mereka. Pembebasan lahan dan konflik dengan aparaturnya lebih berdampak karena masyarakat banyak yang terpancing provokator sehingga menghambat pembangunan bandara *Yogyakarta International Airport*. Alasan yang

mendasari penolakan adalah kehilangannya mata pencaharian warga sekitar yang bergantung pada hasil kebun dan ladang.

Semenjak hadirnya *New Yogyakarta International Airport* Sutedjo selaku Bupati Kulon Progo ditemui usai peresmian *Yogyakarta International Airport* menyatakan di depan publik “bahwa pertumbuhan perekonomian pada tahun 2019 sampai 2020 pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo mencapai 10,83 persen, dan pada masa pandemi Covid-19 ini ekonomi tetap meningkat dan berkembang pesat. Padahal, Kabupaten Kulon Progo sebelumnya termasuk dalam daerah dengan angka kemiskinan lebih tinggi dari lima kabupaten atau kota di Provinsi DIY. Namun sejak *Yogyakarta International Airport* beroperasi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo yang berada di atas dua digit atau tertinggi di DIY" ucapnya, Sabtu 29 Agustus 2020 (bisnis.tempo.com, 30 Agustus 2020). Dengan demikian, hadirnya Bandara di Kabupaten Kulon Progo sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama bagi masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut beberapa masalah mengenai kehadiran Bandara *Yogyakarta International Airport* yang berdampak pada perekonomian masyarakat yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak kehadiran Bandara Yogyakarta International Airport?

2. Bagaimana pengaruh pembangunan *Yogyakarta International Airport* bagi perekonomian masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Ingin mengetahui upaya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat terdampak Bandara Yogyakarta International Airport.
2. Ingin mengetahui seberapa besar perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya kehadiran Bandara *Yogyakarta International Airport*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya *Yogyakarta International Airport* diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Dengan kehadiran bandara masyarakat dapat memanfaatkan celah untuk menciptakan kegiatan perekonomian dengan mudah karena didukung adanya bandara. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan maka dari itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi perekonomian masyarakat yang terdampak akibat *Yogyakarta International Airport* dapat berjalan efektif. Dengan melihat upaya pemerintah saat ini, penulis berusaha untuk menambah kajian mengenai kontribusi dan upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian

masyarakat sekitar. Adapun hasil penelitian ini dapat menjadi suatu jawaban atas permasalahan tersebut

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mampu mengatasi permasalahan perekonomian yang dialami masyarakat akibat relokasi atau pembebasan lahan yang mengakibatkan kehilangan mata pencaharian dan lahan pertanian bahkan lahan pemukiman. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat merangsang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo hingga berkembang dengan pesat serta dapat memanfaatkan *Yogyakarta International Airport* untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan mendorong perekonomian khususnya untuk warga sekitar. Disisi lain penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat praktik bagi pihak yang terkait misalnya pemerintah. Dengan harapan dapat mempelajari hasil penelitian yang kemudian dijadikan bahan pembelajaran dan evaluasi sehingga menghasilkan solusi, strategi, inovasi dan motivasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

No	Penulis	Judul Penelitian dan Nama Jurnal	Hasil
1	Ahmad, G. A. (2018).	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sengketa Agraria dan Viktimologi: Studi Kasus Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Nyia). <i>Jurnal Ilmiah Galuh Justisi</i> , 6(1), 12-24.	Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan strategi pembangunan ekonomi Indonesia, dengan sebuah target akan mapannya perekonomian bangsa. Disisi lain MP3EI sangat kental penghambatannya terhadap kapitalisme, dan dalam prakteknyabanyak menimbulkan masalah, khususnya masalah lahan dan para petani pemilik lahan atau pekarangan.
2	Wulandari, C., & Triguswini, K. (2019).	Resolusi Konflik Pembangunan New Yogyakarta International Airport di Temon Kulon Progo. <i>JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)</i> , 2(2), 75-89.	Konflik pada konstruksi New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo telah berlangsung sejak tahun 2011. Permasalahan yang terjadi adalah konstruksi dilakukan di desa-desa berpenduduk padat dan lahan sawah produktif di Kecamatan Temon, KabupatenKulon Progo. Untuk membangun NYIA, konstruksi diperkirakan membutuhkan 637Ha dari tanah di area berpenduduk padat. Ini termasuk enam desa yang harus diratakan dengan tanah.
3	Handayani, T. (2018)	GoodGovernance dalam Tata Kelola Perekonomian Memacu pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat. <i>Jurnal Iqtisad</i> , 3(1), 1-21.	Prinsip <i>Goodgovernance</i> merupakan sebuah konsep dalam tata kelola pemerintahan yang didasari pada pengelolaan negara yang bersih, amanah dan terpercaya. Tata pengelolaan dalam sistem perekonomian merupakan hal terpenting guna memajukan konsep maupun program ekonomi kerakyatan terutama yang berada di lingkungan dan segala jenis lapisan masyarakat
4	Pamungkas, A. M.	Manajemen Konflik dan Negosiasi Wajah dalam	Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan

	Y., Rahardjo, T., Dwiningty as, H., &Pradeks o, T. (2015).	Budaya Kolektivistik (Konflik Pembangunan Bandara di Kulon Progo). <i>Interaksi Online</i> , 13(1).	masyarakat dan warganya. Seringkali, pembangunan yang ada di daerah menyebabkan konflik dengan masyarakat daerah tersebut, contohnya yaitu konflik pembangunan bandara Internasional Kulon Progo.
5	Hadi, T. M. (2019).	Makna Lahan dan Perlawanan Simbolik: Studi terhadap Konflik Agraria pada Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. <i>Jurnal Sosiologi Indonesia</i> , 9(2), 275-305	Konflik agraria di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang cukup pelik. Kajian-kajian sebelumnya menjelaskan bahwa motif yang melatarbelakangi konflik agraria dapat. Dikelompokan menjadi dua: dominasi dari korporasi dan pemerintah terhadap masyarakat lokal serta motif ekonomi dan terjadi kerusakan lingkungan pada lahan masyarakat. Namun kedua jenis kajian tersebut kurang menggali lebih jauh terkait pemaknaan masyarakat lokal atas lahan mereka yang menjadi penyebab munculnya konflik agraria.
6	Wahyukin asih, E. (2016).	Sikap Masyarakat Desa Palihan Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo. <i>Adinegara</i> , 5(4).	Untuk mengetahui dan memahami sikap masyarakat Desa Palihan terhadap rencana pembangunan bandara Internasional di KabupatenKulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat Desa Palihan terhadap rencana pembangunan bandara meliputi sikap setuju, tidak setuju dan netral. Sikap masyarakat di Desa Palihan dinilai dari pandangan, alasan, dan tindakan dari masyarakat. (1) Padangan masyarakat yang setuju dan netral mengatakan bahwa kebijakan pembangunan bandara harus diwujudkan karena merupakan program pemerintah sedangkan masyarakat yang tidak setuju memiliki padangan kebijakan pembangunan bandara harus dibatalkan karena dirasa tidak adil untuk petani. (2) Alasan masyarakat yang setuju yaitu bahwa pembangunan bandara dapat

			memberikan dampak yang positif, sedangkan masyarakat yang tidak setuju memiliki alasan bahwa pembangunan bandara akan memberikan dampak yang negatif, sedangkan masyarakat netral setuju dengan alasan terpaksa. (3) Tindakan masyarakat yang setuju adalah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim, sedangkan masyarakat yang tidak setuju melakukan penolakan-penolakan dan tidak bersedia mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim, dan masyarakat netral lebih memilih untuk diam.
7	Hidayat, R. (2017).	Potensi Pelanggaran Hak Atas Properti Privat Dalam pembangunan fasilitas publik (Kasus Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo). <i>Journal of Governance</i> , 2(1).	Menemukan informasi secara mendalam tentang potensi pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara oleh negara (pemerintah) di depan umum proyek pembangunan infrastruktur. Menimbulkan pelanggaran hak yang dimanifestasikan dalam bentuk penggusuran atau relokasi paksa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil alih aset dan fungsi tanah warga yang didefinisikan sebagai situs atau lokasi untuk bangunan tertentu fasilitas umum.
8	Hasbullah, H. (2018).	Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara di Indonesia (Studi Kasus Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta).	Pembangunan Bandara baru <i>New Yogyakarta International Airport</i> (NYIA) merupakan salah satu megaprojek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diterjemahkan kedalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Pembangunan Bandara di Kulon Progo berdasarkan Perpres Nomor 48 tahun 2014 adalah salah satu program prioritas potensi ekonomi Jawa. Penyediaan infrastruktur transportasi Bandar Udara di Yogyakarta menjadi kebutuhan ditengah keterbatasan

			fasilitas Bandara Adisutjipto. Kebutuhan Bandara menjadi sangat penting, karena Provinsi DIY merupakan pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah selatan Jawa.
9	Suandi, I. W. (2010).	Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. <i>Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(1)</i>	Kebijakan publik akan optimal jika dibuat dalam undang-undang sedangkan hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Keduanya penting untuk mengatur kepentingan publik. Kebijakan publikumnya dilegalisasikan dalam bentuk hukum sedang hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Maksudnya, sebuah produk hukum tanpa adanya proses kebijakan publik maka produk hukum tersebut dapat kehilangan makna substansinya.
10.	Yanti, A. T. D. (2013).	Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan).	Dampak pembangunan Jembatan Suramadu terhadap sosial ekonomi dan kaitannya dalam pengembangandiberbagai aspek wilayah Jembatan Suramadu khususnya sisi Madura di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, diantaranya: 1. Dampak dalam bidang sosial dan dampak dalam bidang ekonomi; 2. Keterkaitan dampak sosial ekonomi dengan kebijakan pengembangan wilayah jembatan suramadu sisi Madura. 3. Evaluasi kebijakan pengembangan wilayah jembatan suramadu sisi madura dilihat dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan.

Berdasarkan tabel di atas yang telah dijabarkan beberapa peneliti bahwa penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Jadi, di dalam penelitian terdahulu lebih cenderung menjelaskan tentang dampak sosial atau interaksi sosial masyarakat terhadap kehadiran Bandara *Yogyakarta*

International Airport, persengketaan lahan dan resolusi peran pemerintah dalam permasalahan tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini merupakan suatu penelitian atau riset baru yang sebelumnya belum dilakukannya penelitian sehingga layak untuk diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini lebih berfokus untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembangunan Yogyakarta International Airport Terhadap Perekonomian Masyarakat yang intinya akan membahas mengenai kebijaka dan solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi perekonomian masyarakat yang terdampak di Kecamatan Temon.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan berkaitan dengan sebuah perencanaan, pengambilan dan perumusan suatu keputusan, pelaksanaan yang akan menjadi keputusan akan dievaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang. Berupa hasil interaksi antara aktor pembuat kebijakan (pemerintah) yang berdasarkan dari suatu permasalahan yang ada lingkungan di masyarakat dan harus segera diberikan sebuah solusi dari masalah atau fenomena yang ada. Menurut Werf (1997) kebijakan pemerintah berprinsip pada dibuatnya atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan yang berartikan sebagai rangkaian suatu konsep dan asas yang menjadi inti sari dan dasar suatu perencanaan dalam pelaksanaan di bidang

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, kelembagaan dan organisasi).

Sehingga kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang dibuat secara mendasar oleh pihak berwenang sebagaimana pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kepentingan umum (Anonymous, 1992). Pada intinya, kebijakan pemerintah berupa suatu rancangan konsep yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan fenomena atau kejadian yang ada pada lingkungan masyarakat. Hal ini, pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan semacam program kerja dan peraturan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada dan berkembang di lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah memiliki berbagai tingkatan menurut Lembaga Administrasi Negara (1997) antara lain:

1. Lingkup Nasional

Kebijakan nasional merupakan kebijakan Negara yang memiliki sifat fundamental dan strategis bertujuan mencapai tujuan nasional atau negara sesuai dengan pedoman UUD 1945. Kewenangan dalam pembuatan pusat adalah MPR dan Presiden bersama dengan DPR bentuk kebijakan nasional yang tertuang pada peraturan perundang-undangan dapat berupa:

- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat Presiden bersifat memaksa setelah mendapat persetujuan DPR

2. Lingkup Wilayah Daerah

Kebijaksanaan umum pada lingkup daerah bahwa kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan pelaksanaan sistem daerah. Yang menetapkan kebijakan umum di daerah provinsi adalah Gubernur dan DPRD Provinsi.

2. Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik merupakan suatu proses tindakan atau pembuat kebijakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang yang berdampak pada masyarakat luas. Menurut Mustopadidjaja (2003) kebijakan publik yakni suatu keputusan yang berarti upaya untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan aktivitas tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan. Suatu pencapaian tertentu apabila keunggulan negara bangsa ditentukan oleh kualitas kebijakannya. Di setiap wilayah Indonesia pemerintahan daerah juga mempunyai kebijakan publik.

Dengan demikian, daerah yang unggul adalah daerah yang mempunyai kebijakan publik yang tepat serta mengacu pada karakteristik *good governance* (efektivitas, efisiensi, transparansi, aturan hukum dan akuntabilitas). Kebijakan publik diartikan sebagai segala kebijakannya

yang telah ditentukan pihak pemerintah (birokrat) harus memiliki orientasi pada kepentingan publik (Putra, 2001: 19). Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik mencakup pemerintah. Pemerintah mengambil keputusan untuk mengarahkan masyarakat mencapai tujuan publik tertentu. Suatu kebijakan publik telah dirancang agar memiliki tujuan, yakni agar dapat diperolehnya nilai-nilai berdampak positif bagi publik baik yang berkaitan dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik berupa hidup fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengatur dan mencapai tujuan tertentu yang ada pada lingkungan masyarakat sebagaimana dalam menyusunnya melalui berbagai proses atau tahapan yang cukup panjang. Menurut Thomas R. Dye (2001) proses kebijakan publik dalam beberapa proses sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan.
- b. Penyusunan agenda.
- c. Perumusan kebijakan.
- d. Pengesahan kebijakan.
- e. Implementasi kebijakan.
- f. Evaluasi kebijakan.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa segala tahapan untuk membuat kebijakan memerlukan waktu serta proses yang panjang. Agar mencapai tujuan dan tepat sasaran. Berikut merupakan beberapa contoh kebijakan publik antara lain:

- 1) Penetapan pajak daerah yang meliputi pajak tempat hiburan, pajak hotel, pajak restoran, reklame, penerangan jalan, parkir dan lain-lain.
- 2) Penetapan retribusi berupa retribusi jalan umum, mendirikan usaha dan perizinan tertentu.
- 3) Penetapan dilarangnya pedagang kaki lima berjualan di sepanjang trotoar.
- 4) Penetapan jalur transportasi, misalnya bus antar kota.

3. Perekonomian Masyarakat

Menurut Pasal 33 Ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perekonomian itu merupakan susunan yang sebagaimana susunan kebijakan yang akurat, sistematis dan menyeluruh mulai dari yang bersifat nasional atau pusat sampai susunan di daerah-daerah, provinsi hingga kabupaten atau kota. Perekonomian masyarakat merupakan sekumpulan dari beberapa kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungannya. Sehingga Kegiatan perekonomian ini adalah perbaikan mengenai jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam menyusun usahanya.

Menurut Zulkarnain (2003) perekonomian masyarakat adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan identitas suatu negara yang menyangkut dalam dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi serta berpihak kepada kelangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perekonomian masyarakat adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang sangat berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi dan ekonomi berfokus pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada sistem mekanisme pasar yang adil dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam tahap pembangunan serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat. Dengan tujuan agar terjadinya peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Kerja, jumlah output, dan peningkatan pendapatan perkapita nasional (Yustika, 2012:179).

4. Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh pihak birokrat menuju perubahan sebagaimana proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan proses perbaikan yang saling berkaitan pada masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya atau lebih sejahtera. Pembangunan suatu kegiatan yang dinamis merubah suatu keadaan, mengolah sumber daya yang ada serta menghasilkan nilai bagi masyarakat ketahap kemajuan (Eva Banowati, 2013).

Menurut Sam (2008) pembangunan fasilitas umum diartikan sebagai segala macam bentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Dari pernyataan di atas bahwa fasilitas umum merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan yang bersifat umum seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, bandara, dan pelabuhan. Fasilitas yang telah disediakan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Berbagai fasilitas umum seperti halnya bandara yang memiliki fungsi sebagai tempat melayani masyarakat yang hendak menaiki pesawat udara, sebagai tempat pemberhentian, pemberangkatan, ataupun sekedar persinggahan pesawat udara.

Pembangunan bandara yang berada di Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah gambaran program nasional yang dilakukan pemerintah pusat yakni MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Hal tersebut sangat diperlukan agar berdampak pada peningkatan perekonomian. Pada dasarnya pembangunan *Yogyakarta International Airport* bertujuan meningkatkan perekonomian, pengembangan infrastruktur wilayah dan mengubah kehidupan sosial masyarakat. Ketika *Yogyakarta International Airport* telah beroperasi maka dapat memberikan berupa pelayanan yang memiliki kualitas terutama di bidang transportasi udara serta fasilitas yang tersedia di *Yogyakarta International Airport*. Sehingga mendapatkan terdapat nilai lebih pada peningkatan sistem transportasi dan sistem penyediaan fasilitas.

Pembangunan *Yogyakarta International Airport* memberikan dampak dari segi sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang ditimbulkan adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sebagai petani kini beralih profesi. Selain itu dampak sosial lainnya adalah bersifat konsumtif di lingkungan masyarakat seperti halnya nilai jual tanah yang melambung tinggi di sekitar lokasi yang terdampak dikarenakan sebab dari pembebasan lahan pembangunan bandara ini. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pembangunan bandara tersebut, yakni rata-rata masyarakat mengalami peningkatan secara perekonomian dikarenakan mendapat ganti rugi dana relokasi pembangunan *Yogyakarta International Airport*.

Pada tahun 2020 Bandara *Yogyakarta International Airport* telah resmi beroperasi secara optimal. Sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat Kulon Progo saling bersinergi agar bisa menangkap peluang dan mendapatkan manfaat dengan beroperasinya Bandara *Yogyakarta International Airport* tersebut. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kulon Progo secara nyata dan signifikan.

5. Dampak Kebijakan Pembangunan

Dampak merupakan daya akibat yang ada atau muncul dari sesuatu berupa (orang dan benda) yang ikut membentuk karakteristik, suatu kepercayaan atau perbuatan seseorang (KBBI, 2001:849). Selanjutnya, Winarno (2007) menyatakan dampak kebijakan lebih merujuk pada sebab maupun akibat bagi masyarakat, baik yang berupa positif atau berupa negatif yang berasal dari suatu tindakan atau tidak adanya tindakan

pemerintah. Sehingga dalam hal ini ada dua kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan, yaitu dampak yang diinginkan bisa jadi berkonotasi positif dan dampak yang tidak diinginkan bisa jadi berkonotasi negatif

Sementara itu, menurut Langbein dalam Wibawa (1994:38) sudut pandang dampak ditinjau dari sisi pembangunan salah satu upaya agar adanya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang telah ditentukan dari pengalaman, keadaan kenyataan yang sedang dialami dan kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Sedangkan pembangunan menurut (Tjahja, 2000) adalah suatu perubahan yang telah terencana dari situasi ke situasi yang lain yang telah dianggap lebih baik. Pembangunan dapat dimaknai menjadi dua sisi. Yang pertama adalah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berfokuskan dari hasil produksi dan penggunaan sumber daya. Yang kedua pembangunan berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan berpengaruh pada peningkatan interaksi sosial.

Menurut Parsons Dalam Ardyasworo (2011) beberapa upaya dapat mengetahui suatu kebijakan pembangunan sebagai berikut:

- a. Membandingkan permasalahan atau situasi kondisi dengan apa yang terjadi.

- b. Melakukan eksperimen untuk mengkaji seberapa dampak suatu program terhadap suatu lokasi area atau kelompok di lingkungan masyarakat.
- c. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai sehingga tujuan tersebut sudah sesuai dengan targetnya yang sudah terpenuhi.
- d. Pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program kerja

Kebijakan pembangunan yang telah disusun lalu ditentukan oleh pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerintah pusat yang telah menetapkan Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi pembangunan Bandara *Yogyakarta International Airport*. Namun setelah dilihat dalam prospek perkembangannya, banyak dampak positif yang didapat oleh masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berupaya dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha tentu saja melibatkan pengoperasian Bandara *Yogyakarta International Airport*. Masyarakat harus mampu menangkap peluang adanya bandara untuk berusaha sesuai kemampuan dan potensi yang masih terbatas.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan-batasan permasalahan yang menjadi pedoman penelitian tersebut.

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah suatu rencana atau konsep yang membutuhkan proses dan tahapan untuk mengendalikan suatu permasalahan serta memberikan solusi terhadap persoalan tersebut dan dibuat oleh pihak pemerintah sesuai dengan lingkungannya.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu kebijakan yang dibuat pihak pemerintah yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu agar dapat mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan.

3. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat merupakan perkembangan kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

4. Pembangunan

Pembangunan merupakan sebagai kegiatan yang dapat merubah kehidupan baik dari segi sosial maupun ekonomi menuju kehidupan yang lebih baik.

5. Dampak Kebijakan Pembangunan

Dampak Kebijakan pembangunan adalah sebab dan akibat yang muncul karena adanya suatu perbuatan maupun tindakan. Sehingga dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk yang sangat penting dalam menentukan indikator dalam penelitian ini. Dimana variabel dan indikator

penelitian akan membantu tahap dalam mencari data yang akan dibutuhkan.

Mengenai definisi operasuinal dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Dampak positif	1. Aspek Perekonomian a. Meningkatkan pendapatan perkapita daerah Kabupaten Kulon Progo. b. Meningkatkan kesejahteraan kelangsungan kehidupan masyarakat.
Dampak negatif	1. Aspek Perekonomian a. Pertumbuhan ekonomi tidak merata. b. Kehilangan mata pencaharian, lahan produktivitas dan tempat tinggal.

I. Alur Pikir Penelitian

Bagan 1.1 Alur Pikir Penelitian



J. Metode Penelitian

Penelitian adalah alur kaidah keilmuan agar dapat memperoleh informasi serta manfaat tertentu dimana kaidah keilmuan itu memiliki arti jika kegiatan penelitian itu berdasarkan pada tanda-tanda bidang keilmuan berupa empiris, sistematis dan rasional (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian, metode

penelitian sangat berpengaruh untuk menentukan keberhasilan suatu peneliti supaya dalam meneliti mempunyai tuntutan berpikir yang sistematis dan logis agar hasil yang diteliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Winarno, 1990). Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau dari suatu teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Metode kualitatif suatu penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang sedang dialami, lalu dijabarkan atau dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan sebagian metode ilmiah. Menggali informasi yang tertera pada data-data yang telah didapatkan mulai dari dijelaskan selanjutnya dianalisis.

Sesuai judul dalam penelitian “Implikasi Kebijakan Pembangunan Yogyakarta International Airport Terhadap Perekonomian Masyarakat” dengan demikian, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berguna bagi penulis karena pada penelitian ini dapat memperoleh data serta berfokus pada fenomena *numeric* objek penelitian tersebut. Data yang diperoleh bersifat kompleks yang tidak berbasis, sehingga pada penelitian kualitatif ini terlihat realistik dan validitas tidak dapat diketahui melalui standar pengukuran. Selain itu penelitian dalam

proses pengumpulan data sesuai dengan sumber data diperoleh secara murni, baik data-data berupa tulisan, pernyataan maupun dokumen.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam metode kualitatif yang diperlukan adalah data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan pengambilan data secara langsung subjek sebagai sumber atau narasumber yang didapat khususnya data dari dinas-dinas terkait. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli faktanya secara realistis. Adapun yang menjadi objek data primer dalam penelitian ini adalah Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Masyarakat terdampak di Kecamatan Temon.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui perantara pihak lain dan tidak langsung diambil dari subjek suatu penelitian (Azwar, 2005:91). Data sekunder dapat berupa literatur pendukung sejenisnya berupa buku, media massa, media cetak, internet, *website*, arsip, dokumen dan lain sebagainya yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui data-data yang

tertera pada *website*/blog resmi Bappeda, laporan kerja, arsip-arsip maupun dokumen dari informasi terpercaya dan akurat.

3. Unit Analisis

Unit analisis data adalah data yang dikumpulkan melalui tahap analisis penelitian dalam menangkap peristiwa atau fenomena yang terjadi dari objek yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah tanggapan dan tindakan yang dilakukan pemerintah hingga masyarakat mengenai Pembangunan *Yogyakarta International Airport* terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan Temon.

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah pemerintah atau Instansi yang berada di Kabupaten Kulon Progo hal ini mencakup Bappeda Kabupaten Kulon Progo, Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo serta beberapa pihak yang terkait maupun masyarakat Kecamatan Temon yang terdampak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Harbani Pasolong (2013:132) wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua pihak atau lebih secara langsung berhadapan. Dalam penelitian ini penulis melakukan sesi tanya

jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian.

Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan serta keterangan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Pihak yang diwawancarai bagian-bagian divisi instansi yang terkait seperti halnya Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Kabupaten Kulon Progo, Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo serta masyarakat sekitar yang terdampak adanya *Yogyakarta International Airport*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berhubungan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen. Dokumen-dokumen berupa unit analisis yang dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Sugiyono (2010:329) dokumen adalah suatu peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan dan karya dari seseorang.

Adapun data-data dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari *website* resmi Bappeda Kabupaten Kulon Progo, *website* resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, *website* resmi Badan Pusat Statistik, laporan dan arsip Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu, arsip Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kulon Progo, media masa kompas.com, media masa tribune.com. Diharapkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan data sehingga dapat melengkapi data-data yang sebelumnya belum diperoleh

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses untuk menjelaskan, mengamati, membandingkan dan menginterpretasikan pola-pola atau tema yang bermakna dari subyek yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:335) mengartikan bahwa menganalisis data adalah proses mencari data menyusun secara rinci dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi serta catatan lapangan lainnya.

Makna mengenai analisis data ditentukan oleh tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai penelitian. Yang berarti jika suatu data dapat dianalisis dari berbagai macam sudut pandang tergantung pada pertanyaan atau evaluasi apa yang hendak dijawab. Berikut proses-proses analisis kualitatif diperjelas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu proses kegiatan pengumpulan data baik data berupa data primer dari objek-objek penelitian ataupun data-data sekunder.
- b. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga peneliti mendapat gambaran yang lebih jelas.

- c. Penyajian data, yaitu cara mendeskripsikan hasil penelitian kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang digambarkan sistematis agar data yang didapat menarik perhatian pembaca, mudah dipahami dan dimengerti dalam menganalisis sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dari awal pengumpulan data seorang peneliti mencari makna dan arti dari setiap gejala atau indikasi yang diperoleh dari lapangan, mencatat hal penting atau pola penjelasan dan penjelasan secara inti pokok. Setiap kesimpulan diharapkan tepat akurat dan valid.